

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Annisa Justisia, Muhammad Rusli, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol.18, No.1 (2019): 5, <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>
- Basir Rohrohmana, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.6, No.1 (2017): 48.
- Dewi Kartika dan Siti Malikhatun, “Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi”, *Notarius* 11, no. 2 (2018): 289, <https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.31102>
- Eddy Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Magister Administrasi Publik UGM 9.2 (2005): 98, <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>
- Freisy Maria, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Pekara Kepailitan”, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol. 3, No.2 (2015): 148.

- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* (2020): 23, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Lidia Febrianti dkk, “Legal Protection of Contract Worker Wages Base On Indonesian Labor Law and Islamic Law”, *Journal Of Economic, Business, and Accounting* Vol. 5, No.2 (Januari-Juli, 2022): 1758, <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4120>
- Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Sospol* 2.1 (2016): 110, <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Quantri H. Ondang, “Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Lex er Societatis*, Vol. V, no. 7, (September 2017): 32, <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18086>
- Rusman Sumadi, “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7, No.1 (Juni, 2021): 150, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Hukum,” *Bunga Rampai*, 2019, 28.
- Ulfaa Isthufia, “Tingkat kesiapan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dalam penerapan summon discovery service”, *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (2019): 218, <https://10.22146/bip.36854>

Vilhelm Aubert, "Sociology of Law", dalam Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum". *Jurnal Univeristas Katolik Parahyangan* (2015): 227.

BUKU

Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Teori*. Malang: Setara Press, 2018.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

_____. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mulyadi, Kartini. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam Rudy A Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Remy, Sutan. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sumitro, Roni Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja, 2003).
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus

DOKUMEN

Kode Etik AKPI

WEBSITE

Hukumonline, “Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023”, (2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perkara-pkpu-dan-kepailitan-jelang-akhir-2023-lt657b3f6f869f3/?page=2>

Hukumonline, “Kriminalisasi Kurator, UU Kepailitan Tak Bisa Disalahkan”.
(2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kurator--uu-kepailitan-tak-bisa-disalahkan-lt57b58a508208d/>